

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN MULTIKULTURALISME (Sumbangsih Agama Islam dalam Membingkai NKRI)

M. Tho'yib¹

Abstract: *The multicultural values for national unity has been proclaimed by the founding father of Indonesia; At the initial phase of Indonesia's history, this nation has known the foundation of Multiculturalism from thinking his characters. That like the egalitarian principle in writing Abdul Appeared first in 1902 in his Rival duke of Mind, he introduced the term in lieu of noble mind origin. From Soekarno term appears to call for others. Greeting word bung, which means you are an egalitarian form of greeting Because It does not distinguish a hierarchy of social. Likewise in Islam, the history and Teachings of Islam has taught multicultural in three aspects at once, theological perspective first, second and third historical perspective Sociological perspective. Multicultural education paradigm can be applied Islamic owned and corresponds with the principles of national education as set forth in Chapter III, article 4 of Law No. 20 of 2002 on national education system*

Keywords: *Multicultural, Islamic Education and Homeland*

Pendahuluan

Islam sebagai agama hadir ke dunia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Islam Membingkai kemanusiaan dengan persaudaraan dan kasih sayang kepada sesama dan lingkungannya (*rahmatan lil' alamin*). Tak pelak visi "*rahmatan lil' alamin*" ini membutuhkan tata atur dan sistem kelola kehidupan yang mengarah kepada terwujudnya komunitas masyarakat yang berperadaban dengan penghargaan kepada nilai kemanusiaan (*basyariah*), keislaman dan kenegara-bangsa (*wathaniyah*).

Islam dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semestinya tidak dipertentangkan secara diametric; sebaliknya Islam adalah agama yang mempunyai simpul-simpul nilai yang bisa menopang terhadap keberadaan nilai kultur dan kemajemukan (*multicultural*) yang ada di Indonesia. Demikian juga realitas kehidupan kenegaraan di Indonesia ini di atur dalam acuan dan norma syari'at Islam.²

Hal tersebut dapat dilihat pada realitas kehidupan bangsa tercinta ini, yang memiliki slogan nasional yakni "Bhinneka Tunggal Ika" yang mendasari kehidupan bernegaranya dengan Pancasila. Pancasila dapat dinilai memiliki ruh keislaman di semua silanya; sila pertama dalam Pancasila yang menitik tekankan kepada keTuhanan Yang Maha Esa menjadi acuan utama sila-sila setelahnya yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang berdimensi kebijaksanaan dan permusyawaratan, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Kendati demikian masih banyak ditemui adanya konflik yang menghambat cita-cita mulia yaitu mewujudkan demokrasi, serta hampir selalu menyinggung agama dan keragaman budaya. Bahkan kita kerap dihadapkan pada kenyataan banyaknya konflik dan ketegangan yang dipicu oleh sentimen keagamaan. Demikian juga keragaman kultural belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya. Alih-alih sebagai kekuatan pendorong dinamika kehidupan berbangsa, keragaman kultural justru menambah panjang daftar percekocokan di kalangan masyarakat akar rumput.³ Bila seluruh elemen masyarakat mampu mengelola dengan baik dengan cara menempatkan agama Islam

¹ Dosen STAI Al Hikmah Tuban

² Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), 76

³ Yana Syafrie, *Multikulturalisme dan Agenda Kemanusiaan*, 3

secara benar dan memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya, maka tidak mustahil demokrasi akan terwujud seiring dengan terciptanya stabilitas pertahanan dan keamanan bangsa.

Keragaman budaya (multikulturalisme) dalam pandangan Islam adalah *Sunnatullah* yang bersifat mutlak (karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa). Dan dalam memberikan pemaknaannya, seyogyanya manusia menghindari sifat serakah untuk menguasai 'kemutlakan' tersebut. Karena dalam realitasnya, banyak pemberian pemaknaan keberagaman budaya ini dimaknai lain oleh manusia dengan tujuan yang 'tidak suci' sehingga berdampak pada perbedaan faham yang memunculkan perbenturan keyakinan. Tidak berhenti di sini saja, potensi konflik antara kebudayaan (yang tertanam pada manusia) dengan moralitas cerminan dari agama (yang bersumber dari Tuhan YME) tidak terelakkan. Konflik eksistensial ini semakin serius bila ketegangan yang terjadi menyentuh hal-hal yang bersifat *transcendent* dan bertabrakan sesuatu yang *immanent*. Pada saat seperti inilah kekeringan nilai-nilai spiritual dan keislaman mulai diderita oleh umat manusia, sehingga diperlukan upaya untuk menyuburkan kembali nilai luhur dan ajaran Islam yang sebenarnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita.

Islam Dan Multikulturalisme

Tema multikulturalisme adalah gabungan dari tiga kata sekaligus, yakni *multy* (banyak), *cultur* (budaya), *isme* (aliran/paham). Multikulturalisme secara singkat, adalah sebuah paradigma tentang kesetaraan semua ekspresi budaya. Artinya, tidak ada perbedaan stereotype antara kebudayaan suku "primitif" dan peradaban masyarakat industri modern. Keduanya memiliki kesetaraan nilai, dan peran yang dalam mengabdikan kekhususan peran sosial-historis masing-masing.⁴

Sebagai sebuah ide, multikulturalisme teresap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur sosial masyarakat yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Multikulturalisme juga, mau tidak mau harus menjelaskan hak persamaan dalam berbagai permasalahan masyarakat, melingkupi politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum (*law enforcement*) kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Multikulturalisme dalam praktek merupakan suatu strategi dari integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menengarai setiap isu separatisme dan disintegrasi sosial. Pengalaman mengajarkan, bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (tunggal ika) yang paling potensial yang bisa melahirkan persatuan kuat, tetapi justru pengakuan terhadap adanya pluralitas (kebhinnekaan) budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan bangsa menuju pembaruan sosial yang demokratis.⁵

Dalam masyarakat plural, seperti di Indonesia multikulturalisme adalah hal niscaya yang harus melekat sebagai sebuah paham dalam diri masing-masing komunitas, -paham keberagaman dalam kesatuan ini akan mengeleminasi segala konflik. Pengalaman konflik yang cukup frekuwentif yang terjadi pada beberapa tempat dapat dijadikan tolok ukur bahwa negeri ini masih merangkak dalam memahami substansi multikulturalisme.

Tema multikulturalisme ini semakin menarik lagi terlebih setelah adanya arus pikir yang berusaha mempertentangkan persoalan multikultural vis a vis agama; khususnya dengan agama Islam. Diakui banyak pemikir bahwa sebenarnya, cita-cita agung

⁴ Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia, (Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002). 26.

⁵ Yana Syafrie *Multikulturalisme dan Agenda Kemanusiaan*, 7

multikulturalisme ini tidak bertentangan dengan agama Islam; meski basis teoretis masih tetap problematik. Bagi sebagian teolog muslim nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius sehingga mereka menolak konsep ini. Namun demikian belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Meski gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.⁶

Di Indonesia sendiri banyak pemikir muslim yang terlibat aktif dalam dialog dan pemikiran aktif untuk memberi pengertian akan sinergitas Islam dengan multikulturalisme; mereka di antaranya adalah Mun'im A. Sirry (peneliti yayasan Paramadina Jakarta/Kompas, Kamis 1 Mei 2003) menyatakan bahwa dalam rangka membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. *Pertama*, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama. *Kedua*, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern.⁷ Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Kita tak mungkin menghindari dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini.

Abdolkarim Soroush, intelektual Muslim asal Iran, menegaskan bahwa umat beragama dihadapkan pada dua persoalan: *local problems* (problem-problem lokal) dan *universal problems* (problem-problem universal) yakni problem kemanusiaan secara keseluruhan. Menurut dia, saat ini, problem-problem seperti perdamaian, hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, telah menjadi problem global, dan harus diselesaikan pada level itu.⁸ Hanya dengan transformasi internal dan interaksi dengan gagasan-gagasan modern, agama akan mampu melakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap tuntutan multikulturalisme yang telah menjadi semangat zaman.

Dimensi multikulturalisme ini sebenarnya tersirat kuat dalam Islam dengan pernyataan bahwa Islam adalah penebar kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Pengejawantahan dari pernyataan tersebut tidak hanya dalam konteks teologis, tetapi sosial budaya. Islam, seperti yang tercermin dalam sikap Rasulullah SAW, sangat menghargai eksistensi pluralitas budaya dan agama. Salah satu ajaran yang memperlihatkan adanya kesamaan nilai dalam keragaman budaya adalah puasa. Ia merupakan ajaran agama yang diwariskan dari agama-agama sebelumnya.

Dalam kajian yang sama, Mun'im Sirry melihat ada 3 (tiga) istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'.

Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Pada abad ke-20, kemajemukan menjadi syarat

⁶ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa....*, 130

⁷ Yudi Latif, *Tafsir Sosiologis atas Piagam Madinah*, dalam *Islam, HAM, dan Keindonesiaan, Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*, (Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007), 203

⁸ Reason, *Freedom & Democracy in Islam*, 2000, 98

demokrasi. Serba tunggal, misalnya, satu ideologi, satu partai politik, satu calon pemimpin, dianggap sebagai bentuk pemaksaan dari negara.

Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Menurut Bhikhu Parekh⁹ baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Secara teoritis, inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.¹⁰ Di sinilah konsep multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demokratisasi dan nondiskriminasi. Perhatian yang besar terhadap *equalitas* (persamaan) dan nondiskriminasi kaum minoritas telah menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Bukankah sisi terpenting dari nilai demokrasi adalah keharusan memperlakukan berbagai kelompok atau individu yang berbeda tanpa diskriminasi ?. Secara historis, diketahui bahwa demokratisasi terjadi melalui perjuangan berbagai unsur masyarakat melawan sumber-sumber diskriminasi sosial. Manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Tidak ada diskriminasi yang didasarkan pada kelas, jender, ras, atau minoritas agama dalam domain publik. Sebaliknya, setiap individu harus diperlakukan sebagai warga dengan hak-hak dan kewenangan yang sama.¹¹ Sebagai alternatif atas penolakan terhadap diskriminasi, multikulturalisme memberikan nilai positif terhadap keragaman kultural. Konsekuensi lebih lanjut adalah kesediaan untuk memberikan apresiasi konstruktif terhadap segala bentuk tradisi budaya, termasuk agama di dalamnya.

Sinergitas Islam dan Multikulturalisme

Lahirnya agama pada misi awalnya selalu memiliki dua nilai sekaligus, yakni nilai universal (*spiritual*) sekaligus segmental (*multikultural*). Artinya, kehadiran agama adalah wujud akomodasi lintas budaya tanpa ada pembedaan budaya, mengakui keragaman, lintas etnik dan tanpa mengagungkan etnik tertentu, maupun memuliakan jenis kelamin tertentu. Semua agama semestinya menjadi kebanggaan bersama umat manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu nilai yang perlu dikembangkan adalah sikap inklusif untuk menghargai secara sejajar semua corak budaya. Di sinilah perlunya ditumbuhkan multikulturalisme keagamaan atau agama yang ramah budaya.

Dalam kasus penyelenggaraan ritual keagamaan di Indonesia, misalnya puasa, hari raya Idul Fitri, dan Natal, hanya menghadirkan kegembiraan subyektif atau sektoral. Puasa dan Idul Fitri hanya menjadi kebanggaan umat Islam, Natal menjadi milik umat Nasrani, dan begitu seterusnya. Kenyataan ini merupakan akibat pemahaman keagamaan yang teosentris. Agama hanya dipahami sebagai persembahan untuk Tuhan yang diyakini memiliki wilayah dan personifikasi berbeda antar-agama. Pada titik ini Tuhan dibingkai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Padahal Tuhan "memproklamkan" dirinya sebagai penebar cinta kasih untuk semua umat manusia dalam keragaman budaya tanpa merendahkan satu budaya dan mengagungkan budaya lainnya.

⁹ Gurpreet Mahajan, *Democracy, Difference and Justice*, 1998, 213

¹⁰ A. Eby Hara, *Pengalaman Multikulturalisme di Berbagai Negara*, dalam *Al-Wasathiyah*, 2006, 79

¹¹ Yudi Latif, *Tafsir Sosiologis ...*, 194

Dalam multikulturalisme tidak ada dominasi budaya mayoritas dan tirani budaya minoritas. Semuanya tumbuh bersama dan memiliki peluang yang sama untuk menggapai kesejahteraan bersama. Masing-masing budaya memiliki kesempatan yang sama untuk menampakkan eksistensinya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pemberdayaan terhadap seluruh potensi yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial budaya.

Bila hal tersebut dikesampingkan, artinya agama hanya dijadikan sebagai sarana untuk menjustifikasi kepentingan pribadi sehingga terseraklah nilai-nilai universalitasnya yang berakibat tumbuh-suburnya diskriminasi di segala lini kehidupan.¹² Maka saat itulah kekacauan akan terjadi, bahkan akan muncul banyak pihak yang menyalahgunakan wewenang agama yang semula sebagai norma yang mengatur kehidupan manusia agar hidup rukun, tentram dan damai, menjadi sebaliknya yaitu sebagai alat utama memecah belah umat, menyalahkan orang lain yang tidak sependapat bahkan akan memberhancurkan pihak yang dianggap sebagai lawannya.

Basis Paradigmatik Pendidikan Multikultural dalam Islam

Multikulturalisme yang bermakna penghargaan dan pengakuan terhadap budaya lain, di dalam Islam dapat dibenarkan keberadaannya. Multikulturalisme dalam Islam dapat dirujuk minimal dalam tiga kategori, yakni *petama* prespektif teologis, *kedua* prespektif historis dan *ketiga* prespektif sosiologis.

Multikultural dalam prespektif teologis Islam dapat ditemukan dalam banyak ayat-ayat al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemajemukan yang ada di dunia ini adalah sebuah kenyataan yang sudah menjadi *sunnatullah* (ketentuan Allah). Di dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 Allah menyebutnya bahwa kemajemukan adalah kehendaknya, sebagai arti ayat ini "*Wahai manusia, sungguh telah Allah ciptakan kalian dari seorang lelaki dan perempuan, dan menjadikan kalian dari berbagai bangsa dan suku agar kalian saling mengenal....*"¹³ Abdullah Yusuf Ali dalam buku tafsirnya *The Holy Qur'an: Translate and Commentary* memberikan komentar bahwa ayat ini tidaklah ditujukan untuk persaudaraan muslim saja, tetapi kepada seluruh umat manusia, karena hakekat keduanya sama.

Dari ayat 13 surat al-Hujurat di atas, sangat tegas bahwa Islam pada dasarnya menganggap sama pada setiap manusia, yakni tercipta dan dilahirkan dari sepasang orang tua mereka (laki-laki dan perempuan), kemudian keterlahiran ini sendiri mempunyai tujuan untuk saling mengenal dan memahami karakter masing-masing kelompok setelah manusia ini menjadi kelompok yang berbeda.

Dalam surat lain, Q.S. al-Rum ayat 22 Allah berfirman yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui*". Ayat ini menerangkan bahwa perbedaan warna kulit, bahasa, dan budaya harus diterima sebagai sesuatu yang positif dan merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah swt. Untuk itu sikap yang diperlukan bagi seorang muslim dalam merepon kemajemukan dan perbedaan adalah dengan memandangnya secara positif dan optimis, bahwa kemajemukan yang ada justru akan memperkokoh dan memperindah sisi kemanusiaan. Dengannya seorang muslim akan mampu bertindak dengan bijak dan selalu termotivasi untuk berbuat baik.

Secara semiotik, ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang toleransi juga merupakan fondasi umat Islam dalam menatap keberagaman, baik kultur, ras, etnik ataupun agama. Q. S. al-Kafirun ayat 5 yang artinya "*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*".¹⁴ Surat

¹² *Ibid*, 103

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, tt),107

¹⁴ *Ibid*, 314

berisi tentang prinsip untuk saling menghargai antar pemeluk agama. Mengingat tingginya arti toleransi ini, al-Qur'an justru memfasilitasi, bukannya mengebiri terhadap keberadaan orang yang beragama lain. Toleransi sendiri adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Terlebih di Indonesia, yang memiliki komposisi masyarakat yang sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras yang berbeda.¹⁵

Multikulturalisme prespektif historis dalam Islam, dapat dirujuk langsung dari sistem kenegaraan yang diterapkan Nabi Muhammad saw dengan Piagam Madinahnya. Piagam Madinah adalah konsesi atas Hijrahnya Nabi Muhammad saw pada tahun 622 Masehi yang menemukan kondisi sosiologis Madinah berbeda dengan di Makkah. Sebelum hijrah, Nabi memulainya dengan membuat Perjanjian Aqabah (*bai'at al-'aqabah*). Baiat adalah transaksi, seperti jual beli. Artinya, dalam perjanjian ada transaksi seperti akad dalam perdagangan, berkompromi sampai pada yang disepakati. Dalam Perjanjian Aqabah pada tahun 621 M ini disebutkan bahwa orang-orang Madinah akan bersedia menerima Nabi dan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah dengan jaminan Nabi bisa dipercaya menjadi rekonsiliator untuk menegakkan konflik kesukuan (*tribal*) yang tidak ada di Madinah saat itu.

Konsep Islam terhadap orang-orang yang terikat dalam perjanjian tersebut disebut sebagai "*umat*". Umat adalah siapapun yang ikut dalam semua kesepakatan atau perjanjian Piagam Madinah, termasuk di dalamnya adalah Nabi. Siapapun yang diserang akan dibela dan siapapun yang berkhianat akan diserang. Karena itu, pada zaman Nabi tidak ada yang menyerang kecuali dia berkhianat. Piagam Madinah disusun dalam posisi yang sama, hidup, kehormatan dan kehendak mencapai kebahagiaan menjadi jaminan dalam piagam tersebut.¹⁶

Prespektif *ketiga* adalah prespektif sosiologis intern umat Islam sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam praktek keberagaman umat Islam di seantero dunia Islam. Secara internal umat Islam memiliki keanekaragaman madzhab fiqih, tasawuf dan kalam. Dalam bidang fiqih umat Islam Indonesia mengenal adanya madzhab lima, dari Imam Syafii dengan *qaul jadid* dan *qadimnya*, Imam Hanafi, Hambali, Abu Hanifah dan Imam Ja'far. Begitu juga dalam ilmu kalam, Imam al-Asy'ari, dan Maturidy disebut sebagai penggagas Ahlussunnah (Sunni), Wasil bin Atho' dengan mu'tazilahnya, khawarij, murjiah juga ada Syi'ah dan para pendukung Imam Ali dibelakangnya.

Kemajemukan internal umat Islam juga ditemukan dalam praktek pengelompokan sosial, politik kepartaian serta model pendidikannya. Dinasti dan kekhalifahan yang pernah ada dalam sejarah Islam seperti Dinasti Mughal, Fathimiyah, Abasiah dan terakhir dinasti Turki Usmani adalah contoh konkret tentang keragaman yang ada dalam Islam. Dari sudut multikulturalisme internal ini, pluralisme identitas cultural keagamaan bagi masyarakat muslim, bukanlah menjadi sekedar fakta, lebih dari itu, multikulturalisme telah menjadi semangat, sikap hidup dan pendekatan dalam menjalani kehidupan dengan orang lain.

Sejarah dan ajaran Islam yang mengajarkan multikulturalisme ini semestinya dapat diteruskan menjadi basis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tidak hanya bagi lembaga pendidikan Islam tetapi bagi penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan; terlebih dengan nilai penting multicultural ini persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditegakkan.

Setidaknya paradigma pendidikan multicultural yang dimiliki Islam dapat diaplikasikan dan berkesesuaian dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Bab III pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹⁵M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 162

¹⁶ Yudi Latif, *Tafsir Sosiologis ...*, 136

2002 tentang system pendidikan nasional; terutama pada ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa; ayat (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna; dan ayat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Urgensi Multikulturalisme bagi Persatuan Bangsa

Dalam kehidupan bernegara, konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Pada abad ke-20, kemajemukan menjadi syarat demokrasi. Serba tunggal, misalnya, satu ideologi, satu partai politik, satu calon pemimpin, dianggap sebagai bentuk pemaksaan dari negara.

Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Menurut Bhikhu Parekh¹⁷ baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Secara teoritis, inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Di sinilah konsep multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demokratisasi dan nondiskriminasi. Perhatian yang besar terhadap *equalitas* (persamaan) dan nondiskriminasi kaum minoritas telah menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Bukankah sisi terpenting dari nilai demokrasi adalah keharusan memperlakukan berbagai kelompok atau individu yang berbeda tanpa diskriminasi ?. Secara historis, diketahui bahwa demokratisasi terjadi melalui perjuangan berbagai unsur masyarakat melawan sumber-sumber diskriminasi sosial. Manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Tidak ada diskriminasi yang didasarkan pada kelas, jender, ras, atau minoritas agama dalam domain publik. Sebaliknya, setiap individu harus diperlakukan sebagai warga dengan hak-hak dan kewenangan yang sama. Sebagai alternatif atas penolakan terhadap diskriminasi, multikulturalisme memberikan nilai positif terhadap keragaman kultural. Konsekuensi lebih lanjut adalah kesediaan untuk memberikan apresiasi konstruktif terhadap segala bentuk tradisi budaya, termasuk agama.

Nilai urgent multicultural bagi persatuan bangsa jauh-jauh hari telah diproklamirkan oleh para founding father bangsa Indonesia; Pada fase awal sejarah Indonesia, bangsa ini telah mengenal fondasi multikulturalisme dari pemikiran beberapa tokohnya. Seperti prinsip egalitarian yang muncul pertama kali melalui tulisan Abdul Rivai pada tahun 1902 dalam karyanya *Bangsawan Pikiran*, ia memperkenalkan istilah *bangsawan pikiran* sebagai pengganti dari *bangsawan asal*. Dengan memperkenalkan istilah *bangsawan pikiran* untuk menggeser *bangsawan asal*, kalangan inteligensia modern ingin mendobrak konstruksi sosial

¹⁷ A. Eby Hara, *Pengalaman Multikulturalisme di Berbagai Negara*, 111

yang timpang dan *previdge* status keningratan *bangsawan asal* di atas kelompok lain, untuk digantikan dengan *bangsawan* pikiran yang mengutamakan prestasi dan kesetaraan.¹⁸

Mulai dari sinilah imaji keindonesiaan dibangun di atas fondasi kesetaraan dari tiap-tiap orang yang memperjuangkannya, dimana penghargaan terhadap tiap-tiap orang diberikan atas dasar pencapaian prestasi dan komitmen kepada rakyat bukan atas dasar status keningratan maupun perbedaan etnis ataupun dominasi agama tertentu. Perubahan mentalitas dari pengagungan pada *bangsawan asal* menuju *bangsawan pikiran* membawa kalangan intelegensia modern Indonesia pada orientasi cita-cita *kemadjoean*.

Fenomena ini adalah perubahan revolusioner sebagai batu pijakan awal untuk membangun masyarakat terbuka, setara dan pluralistik. Semenjak saat itulah pergerakan nasional moderen dimulai pertama-tama sebagai upaya menghancurkan sekat-sekat hierarkhi masyarakat tribus yang menempatkan perbedaan asal-asul keturunan dan tatanan aristokrasi dalam posisi adiluhung. Respek terhadap keragaman atas dasar penghargaan terhadap nilai kesetaraan menjadi langkah awal membangun model nasionalisme inklusif dan berkeadaban sekaligus membongkar sekat-sekat ketimpangan social diantara kelompok-kelompok sosial di masyarakat.

Perjuangan mewujudkan karakter kebangsaan yang bercirikan inklusif-egalitarian ini menapak lebih jauh seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Lepasnya bangsa Indonesia dari rantai penjajahan diikuti dengan semangat kolektif bangsa untuk menghapuskan segala diskriminasi sosial yang diciptakan oleh formasi kolonialisme. Pada saat itu suatu simbol revolusioner baru yang mengandung semangat kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan muncul dalam istilah panggilan *bung* yang diperkenalkan oleh Soekarno. Kata sapaan *bung* yang berarti saudara dapat dibandingkan dengan kata *citizen* (rakyat) atau *kamerad* (kawan) dalam bahasa Rusia. Sebutan *bung* bagi kaum muda adalah bentuk sapaan egaliter karena tidak membedakan hierarkhi strata sosial. Kandungan makna yang muncul didalamnya--sesuai dengan konteks gelombang pasang api revolusi di Indonesia paska kemerdekaan--dapat diartikan sebagai "saudara revolusioner" atau "saudara nasionalis Indonesia". Dalam istilah tersebut segenap strata sosial kaya, miskin, tua, muda dipersatukan dalam solidaritas sosial dan kesetaraan status bersama sebagai bangsa Indonesia.¹⁹

Titik kulminasi dari perjuangan kaum intelegensia nasional Indonesia untuk membangun fundamen bagi karakter bangsa kemudian tercapai dengan terumuskan nilai-nilai esensial kenegaraan Pancasila. Sejak awal perumusannya kalangan intelegensia dan pemimpin Indonesia seperti Bung Karno telah merumuskan Pancasila sebagai bentuk kesepakatan diantara kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk membangun konsensus bersama diantara setiap identitas-identitas kebangsaan. Penghapusan tujuh kata yang tertera di dalam Piagam Jakarta (menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya) adalah visi multicultural dari *founding father* bangsa untuk membangun sebuah cita-cita kebangsaan yang inklusif dan menjadikan Indonesia sebagai rumah kebangsaan bagi seluruh warga negaranya.

Kesimpulan

Sebagai langkah yang bijak dalam menyikapi adanya beragam problem yang mengancam pecahnya persaudaraan bangsa yang masyarakatnya majmuk, adalah mencari solusi untuk keluar dari jeratan persoalan tersebut. Berikut ini beberapa tawaran untuk merajut kembali tali persatuan yang terurai akibat perbedaan pandangan yang bersumber

¹⁸ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim ...*, 210

¹⁹ George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Sinar Harapan dan UNS Press, 1995), 87

dari keanekaragaman agama, sosial-budaya, etnis dan lainnya. Untuk membangun kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini diperlukan :

1. Perlunya gerakan inklusifitas yang didasarkan pada dua hal. *Pertama*, secara diskursif, gerakan inklusif umat diyakini sebagai penopang bagi terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Karena bagaimanapun, multikulturalisme adalah suatu kenyataan historis di dalam masyarakat yang harus disikapi secara baik. Di sinilah eksklusivitas beragama yang diyakini secara total sebagai kebenaran agama (*religious truth*) bisa menjadi batu sandungan ideologis untuk menyampaikan pesan perdamaian. *Kedua*, secara praksis, praktik kehidupan beragama yang masih mendikotomikan klaim kebenaran dan keselamatan di dalam masing-masing umat agama mesti dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama lainnya. Bukankah, problem pluralisme kerap kali disebabkan oleh fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Karena itulah, upaya-upaya konkret untuk membangun toleransi antarumat beragama mesti terus dilakukan sebagai bagian dari proses sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, secara wacana dan praksis gerakan, sikap umat agama tidak sampai pada kesadaran dan gerakan radikal. Pembokoran (*dekonstruksi*) kesadaran eksklusif, militan, dan radikal adalah langkah awal untuk menjamin masa depan pluralisme. Pada gilirannya, pembangunan kembali (*rekonstruksi*) kesadaran agama yang toleran, inklusif, dan pluralis adalah langkah terakhir untuk menyampaikan pesan perdamaian agama-agama di tengah-tengah masyarakat multikultural. Inilah kondisi yang diinginkan dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik di tengah-tengah ancaman terorisme dan kekerasan.

2. Mengadakan pendidikan Pluralisme dan Multikulturalisme di sekolah-sekolah, untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang keragaman keberagamaan dan hanya melalui pendidikanlah orang bisa mengubah *mindset*-nya. Usulan pendidikan pluralisme ini juga berasal dari sambutan M. Syafi'i Anwar di Regional Conference yang diselenggarakan ICIP bekerja sama dengan Uni Eropa pada 25-28 November 2004 serta sejalan dengan Deklarasi Bali tentang Membangun Kerukunan Antar-agama dalam Komunitas Internasional dari 174 tokoh Asia-Eropa yang mengikuti dialog antar-agama 21 Juli 2005. Dalam deklarasi itu diusulkan antara lain membuat kurikulum di sekolah lanjutan mengenai studi antar-agama, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman dan saling menghormati antarpemeluk agama yang berbeda-beda. Untuk membicarakan level teologi akan lebih baik jika sudah masuk SMA atau perguruan tinggi. Yang terutama diajarkan adalah sejarah agama-agama.

Bila orang sudah tahu tentang sejarah agama-agama niscaya tidak akan pernah menjadi radikal. Sehingga ketika menjalankan dakwah agamanya selalu melihat sejarah. Misalnya, dakwah Wali Songo yang terbukti dalam sejarah berhasil menyebarkan Islam melalui kultural serta beradaptasi dengan kultur local, kepercayaan-kepercayaan dan kebijaksanaan local (*local wisdom*) harusnya menjadi contoh. Bagaimana Sunan Kalijaga memasukkan unsur Islam dalam cerita pewayangan. Tentu itu harus bisa dijadikan pengalaman berharga dalam melakukan dakwah. Karena itulah, kalau kemudian Islam menjadi mayoritas, tidak selayaknya mereka menilai rendah kepada minoritas. Demikian pula dengan agama-agama lainnya.

3. Memahami Tafsir Multikultural. Seharusnya Agama dipahami sebagai formulasi idealisasi (firman) Tuhan tentang kehidupan. Deskripsi (tafsir) budaya terhadap firman Tuhan tersebut telah melahirkan warna-warni agama sesuai dengan keragaman budaya. Inilah tafsir multikultural agama yang lahir dari perbedaan sudut pandang budaya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan sedikit pun untuk menegasikan satu bentuk agama karena dianggap minoritas atau mengagungkan agama lain karena dianut oleh mayoritas, karena

masing-masing berangkat dari satu nilai yang sama, yaitu firman Tuhan. Dalam konteks budaya, maka tidak ada satu pun budaya yang berhak mengeliminasi budaya lain, karena di dalamnya terkandung satu nilai yang sama, yaitu nilai kemanusiaan.

Problem multikulturalisme dalam konteks agama terkendala tidak saja oleh keberadaan agama lain, tetapi juga di dalam agama itu sendiri. Hal ini biasanya bermula dari model penafsiran terhadap firman Tuhan secara ekstrem. Secara umum pola tafsir atas firman Tuhan cenderung "terjebak" pada model yang *diametral*, yaitu antara **tafsir tekstual** dengan tafsir kontekstual atau antara tafsir formal dengan tafsir substansial. Antara wahyu sebagai realitas yang statis dan wahyu sebagai realitas progresif. Penafsiran pertama lebih mengedepankan faktor *personal-emosional*, yaitu agama sebagai milik kelompoknya saja, sementara penafsiran kedua (kontekstual dan substansial) mengedepankan faktor *sosial-rasional*. Dua sisi ini sebenarnya bukan hal yang terpisah. Dalam kacamata multikulturalisme, kedua model penafsiran tersebut mendapat jawaban sintesis dalam konteks pengamalan menjalani ritualitas keagamaan seperti puasa yang tidak hanya menjadi tradisi agama tertentu, tetapi menjadi ruh yang berlaku bagi seluruh agama dengan ajaran yang berbeda (QS 2:183). Muatan ayat tersebut setidaknya menunjukkan dua hal. *Pertama*, legitimasi teologis (*tekstual*). Yaitu bahwa puasa merupakan ajaran Tuhan yang diturunkan untuk peningkatan kualitas diri. *Kedua*, legitimasi budaya (*kontekstual*). Yaitu bahwa puasa merupakan nilai luhur yang sudah membudaya dalam masyarakat sebelum Islam yang perlu terus dilestarikan. Adanya legitimasi teologis dan budaya akan menyebabkan puasa berdampak pada wilayah sosial sekaligus spiritual. Dua sisi yang sering dipahami secara dikotomis dan tersegmentasi oleh sebagian umat Islam.

4. Memberikan pemahaman adanya nilai universal dalam agama. Multikulturalisme mengandaikan adanya kesadaran internal yang inklusif dan mengejawantah dalam perilaku sosial. Ritual agama, idealnya mengantarkan para pelakunya menemukan kesadaran hati nurani yang bersifat universal sehingga memiliki daya pandang egaliter terhadap sesama. Sebuah kesadaran yang mengikat kecerdasan emosi seorang hamba dengan Tuhannya dan menjadi landasan bagi terbangunnya kecerdasan relasi-rasional antar-sesama, serta refleksi-esoteris dan kesadaran-eksoteris yang tumbuh sebagai manifestasi dari proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan. Inilah sebuah proses yang oleh filosof Denmark Soren Kierkegaard (1813-1855) disebut sebagai proses dari *aesthetic stage* menuju *religious stage*. Ibadah itu bukan sekadar firman (perintah) yang bersifat personal, tetapi juga amal (aktualisasi) yang bersifat sosial.

Misalnya pada konteks puasa selain menjadi tradisi agama-agama yang memiliki makna universal juga harus dijadikan energi positif bagi menguatnya pemahaman multikultural yang disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan (*rabbaniyah*) dan kemanusiaan (*insaniyah*). Transformasi spiritual dan semangat multikultural yang dicapai lewat puasa idealnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa terjebak oleh sekat-sekat budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun teologis, apalagi politis. Dalam rangka itu, maka pemahaman terhadap agama-agama harus dilakukan dalam konteks kesamaan misi universal kemanusiaan. Universalitas ini tidak akan mematikan potensi-potensi khas yang ada dalam agama maupun budaya yang beragam. Justru potensi-potensi tersebut bisa tumbuh bersama dalam keragaman (multikultural). Dan ini hanya akan terselenggara apabila ada komitmen dan kesungguhan semua komunitas atau jamaah budaya dan agama baik sebagai mayoritas maupun minoritas untuk bersikap inklusif dan toleran secara setara untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, agama bisa tampil sebagai milik semua untuk bersama.

5. Menemukan landasan strategis dalam ajaran agama. Islam sebagai sebuah risalah profetik dan ajaran ketuhanan yang realistis, secara doktrinal memandang perbedaan dan

pluralitas sebagai *sunnatullah*. Oleh karenanya, Islam menyuruh pemeluknya untuk menjalin hidup secara rukun, toleran, serta saling menghargai dengan semua kelompok masyarakat yang ada tanpa harus membedakan ras, suku, warna kulit, dan agama atau keyakinan apapun (QS. al-Hujurat: 13), melarang berprasangka buruk terhadap orang lain (QS. al-Hujurat: 12), memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa (QS. al-Maidah: 2), melarang perbuatan zalim serta mengedepankan pemberian maaf (QS. asy-Syura: 40), serta memerintahkan untuk lemah lembut terhadap orang lain (QS. Ali Imran: 139).

Ilham Mundzir (aktivis UIN Jakarta) menyatakan bahwa Islam bukan saja sudah memiliki wawasan multikultural dan kemajemukan secara doktrinal *an sich* sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat al Qur'an di atas, melainkan juga mempunyai modal nyata pada tataran praksisnya. Kemajemukan Islam ini terlihat jelas dari banyaknya aliran, *firqah* baik dari sisi fiqh, teologi, politik, tasawuf, maupun politik. Dalam bidang fiqh, misalnya, dijumpai adanya perbagai corak mazhab seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Dhahiriyah, Syi'ah, Hanafiyah, dll. Dalam bidang teologi, ditemukan adanya sekte Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Syi'ah. Tak hanya itu, di bidang tasawuf dan politik pun juga terdapat banyak aliran pemikiran yang sangat beragam.

Walhasil, Islam sudah memiliki modal teoritis dan praktis berkenaan dengan multikulturalisme dan pluralisme, ini yang pertama. Kedua, pada saat yang bersamaan, perkembangan mutakhir yang terjadi dalam masyarakat modern (Barat) juga memungkinkan terwujudnya tatanan dunia yang lebih harmonis. Tetapi, pada aspek kedua ini tentu saja mensyaratkan adanya komitmen, ketulusan dan kejujuran dari pihak Barat untuk mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan persamaan harkat antar sesama manusia secara paripurna, perlu melakukan introspeksi dan kritik diri atas pelbagai sikap, karakter arogansinya. Sehingga, bila Barat masih memakai standar ganda, dan inkonsisten terhadap nilai-nilai itu, maka harapan terwujudnya tatanan global yang adil menjadi impian kosong belaka.

6. Menghindari benturan peradaban ketika terjadi relasi Islam dengan Barat. Untuk menghindari terjadinya benturan peradaban diperlukan adanya dialog dan komunikasi antarperadaban guna memutuskan mata rantai kecurigaan, permusuhan dan pertentangan antara kedua pihak. Upaya dialog ini, menurut Ali Asghar Engineer, merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik di antara pihak-pihak yang bertikai. Seperti halnya penyebaran informasi yang salah melalui, berbagai macam cara yang rentan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, dialog juga bisa menjadi wahana yang efektif menghasilkan kesepahaman. Dialog ini dapat dilakukan oleh semua kalangan mulai dari para intelektual, para agamawan, serta masyarakat dari semua penganut agama (*Islam Masa Kini, 2004*).

Dialog di tingkat intelektual, akan menganalisa lebih jauh mengenai peristiwa-peristiwa dan memahami kekuatan utama yang mendorong munculnya konflik. Di sini, para intelektual juga berupaya mencari strategi-strategi yang dapat menciptakan suasana harmonis antar-keagamaan dan antar-budaya. Para orientalis Barat dituntut untuk lebih obyektif dan jujur dalam melihat Islam, dan pada saat yang sama para intelektual Muslim juga tidak boleh mengobarkan api kebencian terhadap masyarakat Barat. Di tingkat keagamaan, para agamawan harus berperan aktif menggali, mengeksplorasi akar-akar teologi pluralisme, persaudaraan sejati dalam ajaran teologinya masing-masing. Sebagai misal, paham Hindu menekankan anti kekerasan, dan Budha menekankan pada ajaran kasih. Agama Kristen menekankan pada cinta, sedangkan Islam senantiasa menekankan pada keadilan dan persamaan. Dari sini kita melihat bahwa kesemua nilai-nilai tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Terakhir, partisipasi setiap masyarakat agama untuk saling menghormati, menghargai perbedaan agama dan budaya sangat

dibutuhkan, terutama untuk senantiasa mewaspadai kemungkinan munculnya provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan adanya pertikaian, ketidakharmonisan antar-agama dan antar-budaya. Hanya dengan sikap seperti itulah kiranya semua umat dapat hidup di dunia ini secara damai dalam bingkai pluralisme dan multikulturalisme.

Daftar Rujukan

- Hara, A. Eby, *Pengalaman Multikulturalisme di Berbagai Negara*, dalam "Al-Wasathiyah", Vol I, february 2006.
- Hilmy, Masdar, *Melembagakan Dialog, (Antar Teks) Agama*, Kompas, Jakarta, 5 April 2002.
- Kahin, George Mc Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Sinar Harapan dan UNS Press, 1995.
- Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: genealogi Inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005.
- , *Tafsir Sosiologis atas Piagam Madinah*, dalam "Islam, HAM, dan Keindonesiaan, Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama", MAARIF Institute for Culture and Humanity, Jakarta, 23 Mei 2007
- Liliweri, Alo, *Gatra Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2001.
- Makmun, Abin Syamsuddin, *Psikologi Kependidikan*, Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ma'arif, Syamsul, *Islam Dan Pendidikan Pluralisme, (Menampilkan Wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan)*, makalah disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam Di Lembang Bandung Tanggal 26-30 November Tahun 2006
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suparlan, Parsudi, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Simposium Internasional Bali, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- YH, Yana Syafrie, *Multikulturalisme dan Agenda Kemanusiaan*, WASPADA Online